



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**Analisis Profitabilitas Perusahaan Finance Institution yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah
Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan**

SKRIPSI



HESTYA HARTINY

06153135

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

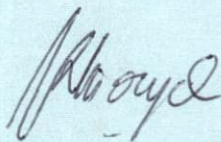
Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Akuntansi, Pembimbing Skripsi, dan Tim Dosen Penelaah Skripsi menyatakan bahwa skripsi mahasiswa berikut ini:

Nama : HESTYA HARTINY
No. BP : 06 153 135
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Strata-1
Judul Skripsi : Analisis Profitabilitas Perusahaan *Finance Institution* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Telah diseminarkan pada tanggal 29 Juli 2010 dan telah disetujui sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Pembimbing dan Tim Penelaah Skripsi :

Pembimbing



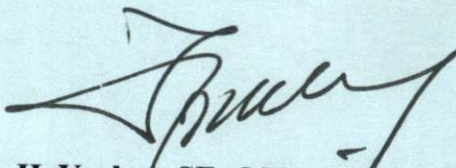
Dra. Raudhatul Hidayah, SE. MS. Ak
NIP. 196806121994032002

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE., MA.
NIP. 195410091980121001



Dr. H. Yuskar, SE., MA., Ak
NIP. 196009111986031001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan rasio profitabilitas berdasarkan *Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009 yang memenuhi kriteria sampe sebanyak 13 perusahaan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T Sampel Berpasangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity*) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Keyword: NPM, ROA, ROE, UU No.36 Thn 2008

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbal'alam, puji syukur penulis yang begitu besar kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Rasio Profitabilitas Perusahaan *Finance Institution* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Penulisan skripsi ini penulis dedikasikan untuk kebahagiaan dan kebanggaan keluarga penulis, yaitu Tonny Martin (Alm)(Ayah), Nofita(Mama), serta Ratih Pertiwi(Adik). Semoga dengan pencapaian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi suatu kebahagiaan dan kebanggaan keluarga penulis, karena tujuan utama hidup penulis adalah untuk membahagiakan dan membanggakan keluarga.

Dan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses pembuatan dan penyelesaian skripsi ini khususnya dan juga selama menempuh pendidikan S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Terima kasih yang tiada tara kepada:

- a. Dr. H Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan sekaligus kepada jajaran pembantu dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
- b. Dr. H. Yuskar, SE. MA. Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi.

- c. Drs. Riwayadi, MBA. Ak dan Dra. Rita Rahayu, Msi. Ak selaku Skkretaris Jurusan dan Kepala Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
- d. Dra. Raudhatul Hidayah, SE. MS. Ak selaku dosen pembimbing yang telah membimbing pembuatan dan penyelesaian skripsi ini.
- e. Dra. Hj. Rahmi Desriani, Msi. Ak dan Drs. A. Rizal Putra, Msi. Ak selaku dosen penelaah skripsi yg telah memberikan masukan bermanfaat untuk skripsi ini.
- f. Suhandi, SE. Msi. Ak selaku pembimbing akademik dan semua dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas atas semua ilmu yang diberikan.
- g. Mama Loli, Da Ari, dan Uni Eva selaku Staf Biro Jurusan Akuntansi dan Ayah beserta karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas lainnya yang telah membantu penulis dalam segala macam urusan administrasi.
- h. Edi Mandra dan Ahmad Effendi, paman penulis yang selalu membantu penulis dalam urusan finansial dan semua kerabat keluarga penulis.
- i. Semua Sahabat dan Teman Sejati penulis yang telah dengan ikhlas dan baik hati memberikan dorongan semangat secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Padang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Laporan Keuangan Perusahaan	8
2.1.1 Neraca	9
2.1.2 Laporan Laba-Rugi	10
2.2 Penggunaan Rasio Keuangan dalam Analisis Laporan Keuangan Perusahaan	10
2.2.1 Pihak yang Berkepentingan terhadap Rasio Keuangan ...	11
2.2.2 Metode Pembandingan Rasio Keuangan Perusahaan	12
2.2.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan yang Utama	14

2.2.4	Analisis Rasio Profitabilitas.....	16
2.2.5	Pengukuran Tingkat Profitabilitas	17
2.3	Perkembangan Perpajakan di Indonesia.....	20
2.5	Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan	24
2.5	Implikasi Perubahan Undang-Undang Pajak terhadap Profitabilitas	24
2.6	Hipotesis.....	38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel	40
3.2	Variabel Penelitian	41
3.3	Jenis dan Sumber Data	42
3.4	Metode Pengumpulan Data	42
3.5	Metode Analisis.....	43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1	Perhitungan Rasio Profitabilitas.....	45
4.1.1	Perhitungan Net Profit Margin.....	45
4.1.2	Perhitungan Return on Asset (ROA)	46
4.1.3	Perhitungan Return on Equity (ROE).....	48
4.2	Pengujian Hipotesis	49
4.2.1	Pengujian Hipotesis 1	50
4.2.2	Pengujian Hipotesis 2	51
4.2.3	Pengujian Hipotesis 3	52

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Keterbatasan Penelitian	54
5.3	Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	x
-----------------------------	----------

LAMPIRAN.....	xi
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perusahaan <i>Finance Institution</i> Yang Memenuhi Kriteria Sampel.....	41
Tabel 4.1 <i>Net Profit Margin</i> Perusahaan Sampel.....	46
Tabel 4.2 <i>Return on Asset</i> Perusahaan Sampel	47
Tabel 4.3 <i>Return on Equity</i> Perusahaan Sampel	49
Tabel 4.4 Rata-Rata Variable Independen (Statistik Sampel Berpasangan)	50
Tabel 4.5 Test Sampel Berpasangan	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Laba Bersih Dan Pendapatan Perusahaan <i>Finance Institution</i> yang menjadi Sampe	xi
Lampiran 2: Daftar Total Aset Dan Total Ekuitas Perusahaan <i>Finance Institution</i> yang menjadi Sampel menjadi Sampel menjadi Sampel	xii
Lampiran 3: Daftar NPM, ROA, dan ROE Perusahaan <i>Finance Institution</i> yang menjadi Sampel	xiii
Lampiran 4: Uji T Sampel Berpasangan Untuk <i>Net Profit Margin</i>	xiv
Lampiran 5: Uji T Sampel Berpasangan Untuk <i>Return On Assets</i>	xv
Lampiran 6: Uji T Sampel Berpasangan Untuk <i>Return On Equity</i>	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan dan pembangunan roda pemerintahan dibiayai oleh pendapatan negara. Sumber pendapatan negara berasal dari dua sektor, yaitu sektor migas dan sektor non migas. Sektor migas memberikan kontribusi yang sangat besar, tetapi penerimaan sektor migas tidak dapat sepenuhnya diandalkan sebagai sumber utama penerimaan secara terus menerus karena persediaan sumber daya migas dari waktu ke waktu semakin menipis, yang pada akhirnya nanti akan habis. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas. Banyak alternatif penerimaan negara dari sektor non migas. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor non migas adalah penerimaan melalui sektor pajak. Karena pajak dapat dikatakan sebagai kunci bagi pembangunan negara sekarang dan masa depan.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah sering kali mengambil langkah dalam menyikapi kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Langkah ekstensifikasi dilakukan dengan tujuan untuk memperbanyak atau menambah jumlah wajib pajak yang belum terjaring padahal mereka telah memenuhi persyaratan menjadi Wajib Pajak sesuai dengan melakukan berbagai perubahan atas Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, sedangkan intensifikasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan proses pemungutan pajak terhadap subyek serta obyek pajak yang sudah ada dan sudah dikenakan pajak sebelumnya.

Sejak 1984, pemerintah terus melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Terobosan itu dimulai dengan *Tax Reform* terhadap aturan perundang-undangan pajak sampai dengan berbagai jenis insentif pajak lainnya. Undang-undang perpajakan hasil *Tax Reform* akhir 1993 beserta perubahannya berupa perluasan dari obyek pajak dan kenaikan tarif yang dilakukan pada tahun 1988 dan 1991 telah menghasilkan peningkatan penerimaan pajak, bahkan melampaui rencana penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBN tahunan. Reformasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di Indonesia.

Pada tahun 2000 reformasi pajak dilakukan dengan cara mencari obyek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan, disamping itu untuk wajib pajak badan, lapisan pajak yang dikenakan berbeda. Diharapkan dengan tarif yang baru ini maka wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat (Radianto, 2004).¹

Dengan pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang yang terbaru tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Maka

¹<http://jurnalskripsisitesis.wordpress.com/2007/10/25/analisis-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-bej-sebelum-dan-sesudah-diberlakukannya-undang-undang-perpajakan-tahun-2000/>; diakses tanggal 5 Januari 2010

pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang juga merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Ikhsan (2001)² menyatakan bahwa pajak itu haruslah bersifat netral dan adil, juga tidak dibenarkan apabila membuat aturan perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap laba setelah pajak (*earning after tax/EAT*) dan pada akhirnya akan berdampak terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian dengan tujuan untuk melihat pengaruh diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan pernah dilakukan sebelumnya pada pasar modal Indonesia. Radianto (2004)³ telah melakukan penelitian mengenai efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000. Hasil penelitiannya memberikan fakta bahwa secara umum pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000 belum dapat meningkatkan efisiensi perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ. Ika (2005)⁴ melakukan penelitian pengaruh penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Kinerja perusahaan diukur dari tingkat *current ratio*, *leverage ratio*, *gross profit margin*, *operating profit margin*, *total asset turnover*, *return on investment*, dan *return on equity*. Hasil penelitian memberikan fakta bahwa secara umum terdapat

² Ibid Hal 1;

³ Ibid;

⁴ Ibid;

perbaikan kinerja perusahaan pasca penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000.

Namun, penelitian dengan tujuan untuk melihat pengaruh diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 terhadap kinerja perusahaan yang terdaftar di BEI belum pernah dilakukan sebelumnya pada pasar modal Indonesia.

Motivasi dari penelitian ini adalah peneliti ingin menguji apakah dengan adanya perubahan Undang-Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan terdapat perbaikan profitabilitas perusahaan-perusahaan *Finance Institution* sebelum dan sesudah diberlakukannya perubahan Undang-Undang tersebut. Pengukuran profitabilitas perusahaan yang diteliti difokuskan terhadap pengukuran profitabilitas perusahaan yang terkait dengan laba bersih perusahaan yaitu dari tingkat *Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity Ratio*.

Berdasarkan pada latar belakang dan hasil penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan lapisan tarif pajak penghasilan badan terhadap profitabilitas keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI, dengan judul penelitian **“Analisis Rasio Profitabilitas Perusahaan *Finance Institution* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Sebelum dan Sesudah Diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat diketahui bahwa pengukuran profitabilitas keuangan perusahaan sangatlah penting karena dengan

mengetahui profitabilitas keuangan perusahaan, kondisi dan potensi suatu perusahaan dapat diketahui dan diprediksi. Oleh karena itu masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

Apakah terdapat peningkatan rasio profitabilitas berdasarkan *Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* pada perusahaan-perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 dan 2009.
2. Periode pengamatan dibatasi selama 2 (dua) tahun, yaitu sebelum diberlakukannya perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008), dan sesudah diberlakukannya perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2009).
3. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas meliputi: *Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity Ratio*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan rasio profitabilitas berdasarkan *Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI dari sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

1.5 Manfaat Penelitian

Beranjak dari perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Praktis

Yang ditujukan bagi Pihak yang Berkepentingan terhadap Rasio Keuangan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi pihak yang berkepentingan terhadap rasio keuangan perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI, yaitu para pemegang saham dan calon pemegang saham, kreditur dan calon kreditur, serta manajemen perusahaan, serta pemerintah, selaku pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan perundang-undangan, dalam penetapan kebijakan terutama menyangkut keuangan dan kebijakan lain berdasarkan analisis rasio keuangan atas pengaruh perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga memiliki manfaat penelitian yang dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam khasanah pustaka dan bahan referensi untuk pengembangan penelitian

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk penulisan yang berbentuk sistematis, penulis mengelompokkan penulisan ini ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan mengenai pengertian analisis rasio perusahaan dan bagaimana cara menghitungnya, serta pokok-pokok penting perubahan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan populasi dan kriteria sample, variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berisikan proses analisis data penelitian dan hasil yang didapat dari penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Analisis laporan keuangan pada dasarnya merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan (Syamsuddin,2000:37). Laporan keuangan akan melaporkan posisi perusahaan pada satu titik waktu tertentu maupun operasinya selama satu periode di masa lalu. Akan tetapi, nilai sebenarnya dari laporan keuangan terletak pada kenyataan bahwa laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk membantu meramalkan keuntungan dan dividen di masa depan. Dari sudut pandang seorang investor, *meramalkan masa depan adalah hakikat dari analisis laporan keuangan*, sedangkan dari sudut pandang manajemen, *analisis laporan keuangan akan bermanfaat baik untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan maupun, yang lebih penting lagi, sebagai titik awal untuk melakukan perencanaan langkah-langkah yang akan meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang* (Brigham&Houston,2006:94).

Ada beberapa cara yang dapat digunakan di dalam menganalisis keadaan keuangan perusahaan, tetapi analisis dengan menggunakan rasio merupakan hal yang sangat umum dilakukan dimana hasilnya akan memberikan pengukuran relatif dari operasi perusahaan (Syamsuddin,2000:37). Rasio keuangan juga dirancang untuk membantu dalam mengevaluasi suatu laporan keuangan (Brigham&Houston,2006:94). Oleh karena sebelum melihat lebih dalam tentang analisis rasio yang menggunakan data keuangan yang diambil dari neraca dan

laporan laba-rugi perusahaan, maka akan lebih bermanfaat bila meninjau laporan keuangan tersebut terlebih dahulu (Weston&Copeland,1999:221).

2.1.1 Neraca

Neraca (*Balance Sheet*) menggambarkan nilai dari aktiva perusahaan dan klaim atas aktiva tersebut pada satu periode akuntansi. Aktiva yang disusun dari atas ke bawah menurut tingkat likuiditasnya yang menurun, yaitu aktiva yang terletak semakin ke atas dapat dicairkan daripada aktiva yang terletak pada kolom bawah. Kelompok aktiva bagian atas, yaitu kas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan diperkirakan dapat dicairkan dalam waktu satu tahun, didefinisikan sebagai *aktiva lancar (current assets)*. Aktiva yang tercantum pada kelompok bagian bawah, yaitu tanah, bangunan dan mesin, yang diperkirakan tidak akan dikonversi menjadi uang tunai (kas) dalam waktu satu tahun, didefinisikan sebagai *aktiva tetap (fixed assets)*. Sisi sebelah kanan dari neraca disusun dengan cara yang serupa. Unsur-unsur yang terdapat pada kolom paling atas akan jatuh tempo dan harus dibayar segera: data-data pada bagian bawah kolom akan jatuh tempo pada waktu yang lebih lama. Kewajiban lancar harus dibayar dalam waktu satu tahun, karena perusahaan tidak pernah diharuskan untuk "membayar" dividen kepada para pemegang saham, saham biasa dan laba ditahan yang keduanya merupakan modal yang "permanen" (Weston&Copeland,1999:223).

2.1.2 Laporan Laba-Rugi

Laporan Laba-Rugi (*Income Statement*) disajikan dengan urutan paling atas penjualan bersih, yang sesudahnya akan dikurangkan dengan berbagai biaya untuk mendapatkan laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa, yang umumnya cukup dinyatakan sebagai laba bersih saja. Biaya-biaya ini meliputi biaya operasional, biaya bunga, dan pajak. Sebuah laporan tentang laba dan dividen per lembar saham (EPS) yang disebut sebagai “total akhir” (*bottom line*) menunjukkan bahwa diantara seluruh pos yang terdapat di dalam laporan laba rugi, EPS adalah yang paling penting (Brigham&Houston,2006:50).

2.2 Penggunaan Rasio Keuangan dalam Analisis Laporan Keuangan Perusahaan

Secara matematis, rasio keuangan tak lebih dari rasio di mana pembilang dan penyebut diambil dari data keuangan. Secara konsep kedengarannya memang sangat sederhana. Namun, tujuan dari penggunaan rasio saat menganalisis informasi keuangan secara sederhana dilakukan dengan membuat standar tolak ukur atas informasi yang akan dianalisis agar rasio dari dua perusahaan yang berbeda dapat dibandingkan atau juga suatu perusahaan dengan batas-batas waktu yang berbeda (Keown, Petty, dkk,2004:71)

Sebelum membicarakan metode yang digunakan dalam menghitung dan menginterpretasikan rasio-rasio keuangan perusahaan, perlu diketahui siapa saja yang berkepentingan terhadap rasio-rasio tersebut (Syamsuddin,2000:37).

2.2.1 Pihak yang Berkepentingan terhadap Rasio Keuangan

Pada umumnya ada tiga kelompok yang paling berkepentingan dengan rasio-rasio keuangan, yaitu: para pemegang saham dan calon pemegang saham, kreditor dan calon kreditor, serta manajemen perusahaan (*the firm's own management*).

Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian utama pada tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun tingkat keuntungan, baik yang sekarang maupun kemungkinan tingkat keuntungan pada masa yang akan datang. Hal ini sangat penting bagi para pemegang dan calon pemegang saham karena tingkat keuntungan ini akan mempengaruhi harga saham-saham mereka miliki. Di samping tingkat keuntungan, para pemegang dan calon pemegang saham juga berkepentingan dengan tingkat likuiditas, aktivitas, serta *leverage* sebagai faktor lain dalam penilaian kelanjutan hidup perusahaan serta proyeksi terhadap distribusi *income* pada masa yang akan datang.

Para kreditor umumnya merasa berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor yang pada saat ini sudah memberikan pinjaman kepada perusahaan ingin mendapatkan suatu "jaminan" bahwa perusahaan tempat mereka menanamkan modalnya akan mampu membayar bunga dan pinjaman pokok tepat pada waktunya. Sedangkan calon kreditor lebih menekankan pada struktur finansial di struktur modal perusahaan. Calon kreditor lebih mementingkan segi keamanan (*safety*) dari modal yang akan mereka pinjamkan. Hal ini tidak berarti bahwa kreditor yang sekarang sudah meminjamkan uangnya tidak mementingkan segi keamanan dari modal yang mereka pinjamkan tetapi

dengan adanya tambahan pinjaman berarti modal pinjaman di dalam perusahaan akan semakin besar, sehingga risiko pun akan bertambah besar juga. Faktor lain yang juga penting bagi calon kreditor adalah "apakah perusahaan tersebut cukup *sehat* dan bisa diperkirakan akan tetap mencapai kesuksesan pada masa-masa selanjutnya?".

Kelompok ketiga yang juga berkepentingan dengan rasio keuangan adalah manajemen perusahaan sendiri (*the firm's own management*). Manajemen perusahaan merasa berkepentingan dengan seluruh keadaan keuangan perusahaan karena mereka menyadari bahwa hal-hal tersebutlah yang akan dinilai oleh pemilik perusahaan maupun para kreditor. Jadi tentu dalam hal ini manajemen perusahaan akan selalu berusaha mempertahankan rasio-rasio yang dianggap baik oleh kedua kelompok di atas. Apabila perusahaan berhasil dengan baik, maka harga saham-sahamnya akan dapat dinaikkan atau setidaknya dipertahankan pada tingkat yang menguntungkan (*favorable*), sehingga kemampuan perusahaan untuk menarik modal baik dengan penjualan saham-saham maupun dengan penjualan obligasi akan semakin bertambah besar. Disamping itu rasio-rasio keuangan perusahaan ini akan digunakan juga oleh manajemen untuk memonitor keadaan perusahaan dari satu periode-periode lainnya. Adanya perubahan-perubahan yang tidak diharapkan akan segera diketahui dan kemudian dicari langkah-langkah pemecahannya (Syamsuddin, 2000:37-39).

2.2.2 Metode Pembandingan Rasio Keuangan Perusahaan

Pada pokoknya ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam membandingkan rasio keuangan perusahaan:

a. *Cross-Sectional Approach*

Yang dimaksud *Cross-Sectional Approach* adalah suatu cara mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasio-rasio antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan sejenis lainnya. Pembandingan dengan cara *Cross-Sectional Approach* ini juga dapat dilakukan dengan jalan membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio rata-rata industri (*the firm's ratio to industry average*) (Syamsuddin,2000:39).

b. *Time Series Analysis*

Time Series Analysis dilakukan dengan jalan membandingkan rasio-rasio keuangan perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Pembandingan antara rasio yang dicapai saat ini dengan rasio-rasio pada masa lalu akan memperlihatkan apakah perusahaan mengalami kemajuan atau kemunduran. Perkembangan perusahaan akan dapat dilihat pada trend dari tahun ke tahun, sehingga dengan melihat perkembangan ini perusahaan dapat membuat rencana-rencana untuk masa depannya. Tersirat dalam pengertian ini bahwa perkembangan suatu perusahaan haruslah dibandingkan dengan masa lalunya. Setiap perkembangan-perkembangan yang tak diinginkan haruslah segera diperbaiki dan diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan semula. *Time series analysis* juga sangat membantu dalam menilai kewajaran (*reasonableness*) dari laporan-laporan keuangan yang diproyeksikan (Syamsuddin,2000:39).

Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan rasio-rasio ini adalah (Syamsuddin,2000:39-40):

- Sebuah rasio saja tidak dapat digunakan untuk menilai keseluruhan operasi yang telah dilaksanakan. Untuk menilai keadaan perusahaan secara keseluruhan sejumlah rasio haruslah dinilai secara bersama-sama. Kalau sekiranya hanya satu aspek saja yang ingin dinilai, maka satu atau dua rasio saja sudah cukup digunakan.
- Perbandingan yang dilakukan haruslah dari perusahaan yang sejenis dan pada saat yang sama. Tidaklah tepat jika membandingkan rasio keuangan perusahaan A pada tahun 200X dengan rasio perusahaan B pada tahun 200Y.
- Sebaiknya perhitungan rasio keuangan didasarkan pada data laporan keuangan yang sudah diaudit (diperiksa). Laporan keuangan yang belum diaudit masih diragukan kebenarannya, sehingga rasio-rasio yang dihitung juga kurang akurat.
- Adalah sangat penting untuk diperhatikan bahwa pelaporan dan akuntansi yang digunakan haruslah sama.

2.2.3 Jenis-Jenis Rasio Keuangan yang Utama

Setiap analisis mempunyai tujuan atau kegunaan yang menentukan perbedaan penekanan yang sesuai dengan tujuan tersebut. Seorang analis, misalnya adalah bankir yang sedang mempertimbangkan pemberian kredit jangka pendek untuk suatu perusahaan. Para bankir terutama akan menekankan pada posisi perusahaan jangka pendek, sehingga mereka menekankan pada rasio-rasio

likuiditas. Sebaliknya, pemberi kredit jangka panjang akan lebih menekankan pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan efisiensi operasinya. Mereka mengetahui bahwa operasi yang tidak efisien akan mengikis nilai aktiva dan posisi sekarang yang kuat tidak akan menjamin bahwa dana akan tersedia untuk melunasi suatu penerbitan obligasi 20-tahun. Demikian halnya dengan para calon pemegang saham yang menanamkan modalnya dalam bentuk saham biasa, akan lebih tertarik dengan profitabilitas dan efisiensi jangka panjang. Maka tentunya manajemen harus mampu membayar hutang kepada kreditor jangka pendek maupun kreditor jangka panjang, termasuk kemampuan menghasilkan laba untuk para pemegang saham (Weston&Copeland,1999:225).

Rasio-rasio keuangan dapat digolongkan menjadi enam jenis:

1. Rasio Likuiditas, yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya jika jatuh tempo.
2. Rasio Solvabilitas/*Leverage*, yang mengukur hingga sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang.
3. Rasio Efektivitas/Aktivitas, yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya.
4. Rasio Profitabilitas dan Rentabilitas, yang mengukur efektivitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan.
5. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*), yang mengukur kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri.

6. Rasio Penilaian (*Valuation Ratio*), yang mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar yang melampaui pengeluaran biaya investasi.

2.2.4 Analisis Rasio Profitabilitas

Analisis rasio profitabilitas perusahaan merupakan bagian utama analisis laporan keuangan. Karena, profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio profitabilitas (*profitability ratio*) menunjukkan kombinasi efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang. Seluruh laporan keuangan dapat digunakan untuk analisis profitabilitas, namun yang paling penting adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan hasil operasi perusahaan selama satu periode. Tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi yang memiliki peran penting dalam menentukan nilai, solvabilitas, dan kualitas perusahaan (Wild,dkk,2005:110).

Analisis rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor kualitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek (sekuritas). Pengukuran dan peramalan laba merupakan pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. Bagi kreditor, laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. Ketika mengevaluasi profitabilitas perusahaan, fokus pertanyaannya adalah:

- Apakah ukuran laba yang relevan bagi perusahaan?
- Bagaimana kualitas laba?
- Bagaimana daya tahan (termasuk stabilitas tren) laba dan komponen-komponennya?

- Bagaimana kekuatan laba (*earning power*) perusahaan?

2.2.5 Pengukuran Tingkat Profitabilitas

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan di mana masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi tingkat *earning* dalam hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari pemilik perusahaan. Dalam hal ini perhatian ditekankan pada profitabilitas, karena untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan/*profitable*. Tanpa adanya keuntungan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk menarik modal dari luar. Para kreditor, pemilik perusahaan, dan terutama sekali pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntungan di masa depan perusahaan (Syamsuddin,2000:59).

Ada rasio-rasio pengukuran profitabilitas dalam hubungan dengan volume penjualan, total aktiva, dan modal sendiri yang biasa digunakan, di mana hal ini sebenarnya dapat langsung dilihat dari laporan laba-rugi. Rasio tersebut adalah (Syamsuddin,2000:61):

1. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan persentase dari laba kotor (*sales-cost of good sold*) dibandingkan dengan penjualan (*sales*). Semakin besar *gross profit margin* semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena *cost of good*

sold relative lebih rendah dibandingkan *sales*. Sebaliknya, semakin kecil *gross profit margin* semakin tidak baik keadaan operasi perusahaan.

2. *Operating Profit Margin*

Ratio ini menggambarkan apa yang biasanya disebut "*pure profit*" yang diterima atas setiap rupiah dari penjualan yang dilakukan. *Operating profit* disebut murni (*pure*) dalam pengertian bahwa jumlah tersebutlah yang benar-benar diperoleh dari hasil operasi perusahaan dengan mengabaikan kewajiban-kewajiban keuangan berupa bunga serta kewajiban terhadap pemerintah berupa pembayaran pajak. Semakin tinggi rasio *Operating profit margin* akan semakin baik pula operasi suatu perusahaan.

3. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan ratio antara laba bersih (*net profit*) yaitu penjualan sesudah dikurangi dengan seluruh beban (*expenses*) termasuk pajak yang dibandingkan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, semakin baik operasi suatu perusahaan. Suatu *net profit margin* yang dikatakan "baik" akan sangat tergantung dari jenis industri di mana perusahaan itu berada (Syamsuddin, 2000:62).

4. *Return on Assets (ROA)*

Return on Assets (ROA) adalah rasio keuntungan bersih setelah pajak untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif pula atau rugi. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba.

5. *Return on Investment (ROI)*

Return on Investment (ROI) atau yang sering juga disebut dengan “*return on total assets*” merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Dengan menggunakan *Du Pont System* akan dapat dilihat *return on investment* yang akan dihasilkan melalui perkalian antara keuntungan dari komponen-komponen penjualan serta efisiensi penggunaan total aset di dalam menghasilkan dengan memperbesar kedua atau salah-satu komponen tersebut di atas. Hubungan antara kedua komponen yang mempengaruhi *return on investment* atau besar kecilnya *net profit margin* dan *total assets turnover* akan sangat tergantung pada jenis usaha dari masing-masing perusahaan.

6. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity merupakan suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Semakin tinggi *return* atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilikan perusahaan.

Penggunaan *debt ratio* ($\text{total liabilities} / \text{total assets}$) untuk mengubah *return on investment (ROI)* menjadi *return on equity (ROE)* menggambarkan pengaruh dari *leverage* (penggunaan modal pinjaman) atas *return* yang diperoleh pemilik perusahaan. Perhitungan *return on equity (ROE)* dengan

menggunakan sistem Du Pont yang dimodifikasi memberikan beberapa keuntungan, karena kita dapat melihat secara langsung faktor-faktor yang mempengaruhi *return on equity*, yaitu keuntungan atas komponen-komponen *sales (net profit margin)*, efisiensi penggunaan aktiva (*total assets turnover*), serta penggunaan leverage (*debt ratio*).

2.3 Perkembangan Perpajakan di Indonesia⁵

Di negara mana pun, termasuk Indonesia, pemerintah mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap perekonomian negara. Pengaruh tersebut dapat diwujudkan baik dalam pemasukan pemerintah dari dana yang tersedia dari perekonomian dalam negeri berupa pajak, retribusi, maupun iuran, pengeluaran pemerintah baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan melakukan peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengelola perekonomian, sehingga sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Wujud pengaruh yang pertama, jika ditinjau dari perusahaan swasta menempatkan pemerintah seolah-olah dalam posisi sebagai pemegang saham yang cukup potensial dalam perekonomian. pemegang saham ini meminta bagian atas laba sebesar 15% sampai 35% melalui mekanisme pajak penghasilan. Pemasukan pajak dengan sendirinya memegang porsi yang cukup dalam pendapatan pemerintah. Apalagi dalam kondisi pendapatan dari sektor migas saat sekarang ini yang tidak dapat diandalkan lagi, maka pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah untuk mengintensifkan penerimaan dari pajak. Dengan demikian porsi penerimaan pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan: 2008

dalam negeri akan semakin penting, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Wujud pengaruh yang kedua berhubungan dengan yang pertama dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika belanja meningkat, maka dengan sendirinya pendapatan harus dinaikkan. Belanja tersebut pada hakekatnya merupakan pengembalian dana yang ditarik dari masyarakat, baik berupa gaji pegawai atau pengeluaran rutin untuk penyelenggaraan pemerintahan lainnya, maupun pembiayaan proyek melalui Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).

Pajak, bagi perusahaan swasta, merupakan pengeluaran yang secara khusus tidak diterima bentuk pengembaliaanya secara langsung baik berupa barang, jasa, atau dana. Dengan demikian, perusahaan lebih memandang pemerintah dari wujud pengaruhnya yang pertama pada saat mengeluarkan uang untuk membayar pajaknya dan wujud pengaruh yang kedua ketika menjadi rekanan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa bagi keperluan pemerintah. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai banyak perusahaan yang bergantung pada pengeluaran pemerintah, sehingga kedua wujud pengaruh di atas mempunyai intensitas pertimbangan yang jauh lebih tinggi daripada di negara maju.

Wujud pengaruh ketiga dapat dilakukan di dalam kerangka dua wujud pengaruh yang terdahulu maupun tidak.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksudkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
- c. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
- d. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
- e. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapatkan prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu

dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya.

- b. Dalam rangka meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain, mengedepankan prinsip keadilan dan netralitas dalam penetapan tarif, dan memberikan dorongan bagi berkembangnya usaha-usaha kecil, struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan disederhanakan yang meliputi penurunan tarif secara bertahap, terencana, perbedaan tarif, serta penyederhanaan lapisan yang dimaksudkan untuk memberikan beban pajak yang lebih proporsional bagi tiap-tiap golongan Wajib Pajak tersebut.
- c. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, system *self assessment* tetap dipertahankan dan diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan lebih sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, kemudahan yang diberikan berupa peningkatan batas peredaran bruto untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Peningkatan batas peredaran bruto untuk menggunakan norma ini sejalan dengan realitas dunia usaha saat ini yang makin berkembang tanpa melupakan usaha dan pembinaan Wajib Pajak agar dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas.

Maka dari itu pemerintah melakukan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2009.

2.4 Pokok-Pokok Perubahan Peraturan Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan ⁶

1. Subjek Pajak (Pasal 2 ayat (5))

Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap meliputi:

- Gudang;
- Ruang untuk promosi dan penjualan; dan
- Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui internet

2. Objek Pajak (Pasal 4)

a. Pengalihan Hak Di Bidang Pertambangan

(Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5)

Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 5).

b. Penghasilan Dari Usaha Berbasis Syariah

(Pasal 4 ayat (1) huruf q)

Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah ditegaskan sebagai objek pajak.

c. Imbalan Bunga

(Pasal 4 ayat (1) huruf r)

⁶ <http://www.klinik-pajak.com/pokok-pokok-perubahan-undang-undang-pph-baru.html>: 13 Januari 2008

Imbalan bunga yang diperoleh WP sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP ditegaskan sebagai objek pajak.

d. Bunga Obligasi Yang Diterima Reksadana

(Pasal 4 ayat (3) huruf j)

Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j) sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU PPh penghasilan tersebut merupakan objek pajak.

e. Surplus Bank Indonesia

(Pasal 4 ayat (1) huruf s)

Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek pajak.

3. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2)

- Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini, seperti antara lain:
 - Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
 - Hadiah undian
 - Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura
 - Persewaan tanah dan bangunan
- Memindahkan bunga simpanan koperasi yang sekarang dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek PPh Pasal 4 ayat (2) final.
- Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:
 - Penghasilan dari transaksi derivatif; dan
 - Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.

4. Pengecualian Dari Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3))

- Zakat Dan Sumbangan Keagamaan

(Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 1)

- Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur dengan PP)

- Inter-Corporate Dividend

(Pasal 4 ayat (3) huruf f)

Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang menerima *inter-corporate dividend* dihapus.

- Beasiswa

(Pasal 4 ayat (3) huruf l)

Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak (syarat, dll diatur dengan PMK)

- Bagian Laba Unit Penyertaan KIK

(Pasal 4 ayat (3) huruf i)

Bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak.

- Sisa Lebih Lembaga Pendidikan Dan Lembaga Litbang

(Pasal 4 ayat (3) huruf m)

Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan/atau bidang litbang (yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya) yang ditanamkan kembali dalam jangka waktu paling lama empat tahun dikecualikan sebagai objek pajak (ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan PMK).

- Bantuan/Santunan Dari BPJS

(Pasal 4 ayat (3) huruf n)

Bantuan/santunan dari BPJS yang diterima WP tertentu bukan merupakan Objek Pajak (ketentuan lebih lanjut diatur dengan atau berdasarkan PMK).

5. Biaya Pengurang Penghasilan Bruto (Pasal 6)

- Biaya Promosi dan Penjualan

(Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 7)

Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan PMK.

- Biaya Beasiswa

(Pasal 6 ayat (1) huruf g)

Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.

- Piutang Tak Tertagih

(Pasal 6 ayat (1) huruf h)

Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:

1. Telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan
3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada

perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.

4. Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil yang dihapuskan.

- Pemupukan Dana Cadangan

(Pasal 9 ayat (1) huruf c)

Pembentukan cadangan diperluas meliputi:

1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
4. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
5. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,

- Sumbangan yang dapat dibiayakan

(Pasal 6 ayat (1) huruf l,j,k,l dan m)

Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:

1. Sumbangan penanggulangan bencana nasional
2. Sumbangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
3. Biaya pembangunan infrastruktur sosial

4. Sumbangan fasilitas pendidikan
5. Sumbangan pembinaan olahraga
6. Isteri Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri

(Pasal 8 ayat (2))

- Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
- Tata cara penghitungan PPh terutang sama dengan suami-isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

7. Norma Penghitungan Penghasilan Neto

(Pasal 14 ayat (2))

- Batas peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dinaikkan dari Rp 600 juta menjadi sebesar Rp 4,8 miliar.
- Ketentuan ini sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak

(Pasal 7 ayat (1))

	Sekarang (Rp)	RUU (Rp)
WP	13.200.000,-	15.840.000,-
WP Kawin	1.200.000,-	1.320.000,-
Isteri Bekerja	13.200.000,-	15.840.000,-
Tanggungan	1.200.000,-	1.320.000,-
Maks. Tanggungan	K/3	K/3

9. Tarif (Pasal 17)

- Tarif WP Orang Pribadi

(Pasal 17 ayat (1) huruf a)

Keputusan Sebelum Perubahan:

	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d Rp 25.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-	10%
3.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000	15%
4.	Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,-	25%
5.	Di atas Rp200.000.000,-	35%

Keputusan Perubahan:

No.	Lapisan Penghasilan	Tarif
1.	S.d. Rp 50.000.000,-	5%
2.	Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000	15%
3.	Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp 500.000.000,-	25%
4.	Di atas Rp500.000.000,-	30%

- Penurunan Tarif Lapisan Tertinggi WPOP

(Pasal 17 ayat (2))

Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Tarif WP Badan

(Pasal 17 ayat (1) huruf b)

Ketentuan Sebelum Perubahan

Lapisan Penghasilan	Tarif
s.d Rp 50.000.000,-	10%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-	15%
Di atas Rp 100.000.000,-	30%

Ketentuan Perubahan:

- Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009.
- Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.

▪ Tarif WP Perseroan Terbuka

(Pasal 17 ayat (2b))

WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka memperoleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat:

- Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia; persyaratan tertentu lainnya.

▪ Tarif Dividen Yang Diterima WP OP Dalam Negeri

(Pasal 17 ayat (2c))

Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri adalah setinggi-tingginya sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih lanjut dengan PP).

10. Pencegahan Penghindaran Pajak (Pasal 18)

1. Pembelian saham atau aset perusahaan WP dalam negeri melalui Special Purpose Company (SPC).
2. Penjualan saham SPC di tax haven country yang memiliki saham WPDN.
3. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan oleh perusahaan induk di luar negeri untuk bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam negeri yang merupakan anak perusahaannya.

PASAL 18 AYAT (3b)

Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*Special Purpose Company*), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya

melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.

PASAL 18 AYAT (3c)

Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *Special Purpose Company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*Tax Haven Country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.

PASAL 18 AYAT (3d)

Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut.

11. Pemotongan/Pemungutan

- Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan

Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan:

- Tarif bagi WP ber-NPWP

— Tarif bagi WP tidak ber-NPWP

- Saat Terutang

Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada saat biaya dibebankan (diakui) dalam pembukuan dihapuskan.

Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:

- Saat dibayarkan;
- Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
- Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.

Tarif Pemotongan/Pemungutan

Jenis Pot/Put	Tarif Non-NPWP dibandingkan Tarif NPWP
Pasal 21	20% lebih tinggi
Pasal 22	100% lebih tinggi
Pasal 23	100% lebih tinggi

- Perluasan Objek PPh Pasal 22

WP yang membeli barang yang tergolong sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai pembayaran PPh tahun berjalan.

- Perubahan tarif PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15% diubah menjadi sebagai berikut:

- 15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya;
- 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya.

- Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal 26
 - Perluasan objek baru:
 - Keuntungan karena pembebasan utang
 - Penegasan:
 - Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

12. Kredit Pajak Luar Negeri (Pasal 24)

Ketentuan mengenai penentuan sumber penghasilan diperluas meliputi:

- Sumber penghasilan dari pengalihan hak penambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
- Sumber penghasilan dari pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada;
- Sumber penghasilan dari pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

13. Angsuran Pajak Tahun Berjalan (Pasal 25)

- Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang wajib membuat laporan keuangan berkala.

Seluruh perusahaan yang diwajibkan membuat laporan keuangan berkala dapat membayar angsuran berdasarkan laporan keuangan berkala tersebut.

- PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Tertentu.

Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75% dari peredaran bruto.

- Fiskal Luar Negeri.

Pasal 25 ayat (8))

Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum memiliki NPWP.

Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai tahun 2011 seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu membayar FLN.

14. Ketentuan Perpajakan Pertambangan Dan Syariah

(Pasal 31 D)

Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha: pertambangan minyak dan gas bumi;

- Bidang usaha panas bumi,
- Bidang usaha pertambangan umum
- Bidang usaha berbasis syariah

Diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

15. Fasilitas Perpajakan Bagi UMKM

(Pasal 31E)

WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal

yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

2.5 Implikasi Perubahan Undang-Undang Pajak terhadap Profitabilitas

Penghasilan atau laba usaha dari perusahaan akan dikenai pajak yang dinamakan pajak penghasilan. Dengan adanya pajak penghasilan ini akan mengakibatkan adanya kas keluar untuk membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula besarnya pajak yang harus dibayarkan. Berdasarkan uraian tersebut tampak bahwa pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi struktur pembiayaan bagi suatu perusahaan. Kebijakan-kebijakan fiskal pemerintah yang tertuang dalam perundang-undangan mempunyai makna yang penting dan sangat sensitif jika dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini telah dibuktikan oleh Eugene F. Brigham (1987) perubahan hukum pajak membawa dampak pada penanaman modal dan pengambilan keputusan kontrak. Pajak bisa membawa dampak besar pada aliran kas dan di beberapa kasus dampak pajak bisa membuat berhentinya sebuah proyek. Oleh karena itu ketentuan perpajakan akan berdampak pada keputusan penganggaran modal (Mariwan Dan Arifin, 2005:74).

Reformasi perpajakan dalam bentuk perubahan Undang-Undang Perpajakan dapat membawa implikasi terhadap kinerja perusahaan. Implikasi tersebut bisa bersifat positif maupun bersifat negatif. Jika reformasi perpajakan tersebut membawa implikasi yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara itu jika reformasi perpajakan tersebut membawa

implikasi yang negatif tentunya akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Disisi yang lain pemerintah tentunya mengharapkan bahwa dengan adanya reformasi perpajakan tersebut kinerja perpajakan akan semakin baik, sehingga dengan semakin membaiknya kinerja perpajakan akan membawa implikasi yang positif terhadap penerimaan pemerintah dari sektor pajak penghasilan (Mariwan Dan Arifin,2005:68).

2.6 Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan Undang-Undang Pajak penghasilan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terhadap rasio profitabilitas perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI. Penjelasan diatas menerangkan bahwa terdapat perubahan peraturan perpajakan terhadap WP Badan. Seperti Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009. Dan mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Serta peraturan yang menerangkan WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar.

Maka dari itu perubahan ini dengan sendirinya membuat satu perbedaan perhitungan pajak dalam satu perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI antara tahun sebelum terjadi perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru yaitu tahun 2008 dengan tahun sesudah terjadi perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru.

Perhitungan pajak yang berbeda ini memberikan 2 kemungkinan dampak kepada rasio profitabilitas perusahaan yang terdaftar di BEI, yaitu kemungkinan untuk meningkatkan rasio profitabilitas perusahaan dan kemungkinan untuk menurunkan rasio profitabilitas perusahaan.

Namun, dengan perubahan tarif pajak yang sebelumnya berdasarkan 5 lapis pengenaan pajak menjadi hanya satu lapis pengenaan pajak, maka perubahan ini membawa dampak penurunan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Sehingga laba bersih setelah pajak dapat mengalami peningkatan.

Maka dari itu, berdasarkan landasan teori diatas maka ditarik hipotesis:

H1: Terjadi peningkatan rasio *Net Profit Margin* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

H2: Terjadi peningkatan rasio *Return on Assets* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

H3: Terjadi peningkatan rasio *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Identifikasi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Perusahaan yang tergolong adalah perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dan 2009
- Perusahaan *Finance Institution* tersebut mengeluarkan laporan keuangan yang telah diaudit (diperiksa) dan diumumkan di BEI pada tahun 2008 dan 2009.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun kriteria yang digunakan dalam sampel ini adalah sebagai berikut :

- Perusahaan *Finance Institution* tersebut merupakan perusahaan yang *listing* di BEI pada tahun 2008 dan 2009
- Perusahaan *Finance Institution* tersebut telah melampirkan laporan keuangan 2008 dan 2009 yang telah diaudit (diperiksa) sampai tanggal 1 April 2010 di www.idx.co.id.
- Perusahaan *Finance Institution* tersebut mendapatkan laba dan tidak mengalami rugi pada tahun 2008 dan 2009.

Berdasarkan kriteria sampel di atas, didapat 13 perusahaan *Finance Institution* sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perusahaan *Finance Institution* Yang Memenuhi Kriteria Sampel

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASDF	PT. Astra Sedaya Finance
2	BCAF	PT. BCA Finance
3	BFIN	PT. BFI Finance Indonesia Tbk
4	BFNC	PT. Bhakti Finance
5	FIFA	PT. Federal International Finance
6	IMFI	PT. Indomobil Finance Indonesia
7	OTMA	PT. Oto Multiartha
8	PPGD	PERUM Pegadaian
9	SMFP	PT. Sarana Multigriya Finansial
10	SMSF	PT. Sinar Mitra Sepadan Finance
11	SOFN	PT. Summit Oto Finance
12	TUFI	PT. Mandiri Tunas Finance
13	WOMF	PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

3.2 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Net Profit Margin

Kalkulasi net profit margin adalah sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

2. *Return on Asset (ROA)*

Kalkulasi *Return on Asset* adalah sebagai berikut:

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. *Return on Equity (ROE)*

Return on equity dihitung sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Laporan Keuangan Perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI yang telah diaudit tahun 2008 dan 2009. Data sekunder ini diperoleh dari situs resmi Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id)

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah sebagai berikut :

a. Survei Observasional (*Observational Surveys*)

Yaitu dengan memperoleh data tanpa mengajukan pertanyaan kepada responden. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi situs www.idx.com.id dan mengunduh data laporan keuangan perusahaan yang sudah ditentukan sebagai sampel terhadap penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami bahan mengenai Rasio Profitabilitas dan Perubahan Undang-Undang

Perpajakan menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dari literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan sumber lain.

3.5 Metode Analisis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan yang signifikan antara variabel yang diuji, yaitu *Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity*, maka dari itu digunakan uji T Sampel Berpasangan yang pengolahan datanya dibantu dengan menggunakan fasilitas program komputer *Microsoft Office Excel 2003* dan *Statistical Package Social Science 16 (SPSS 16)*.

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut (Sarwono,2009:138-139):

1. Perumusan Hipotesis

Ho : Terjadi peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity*) pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

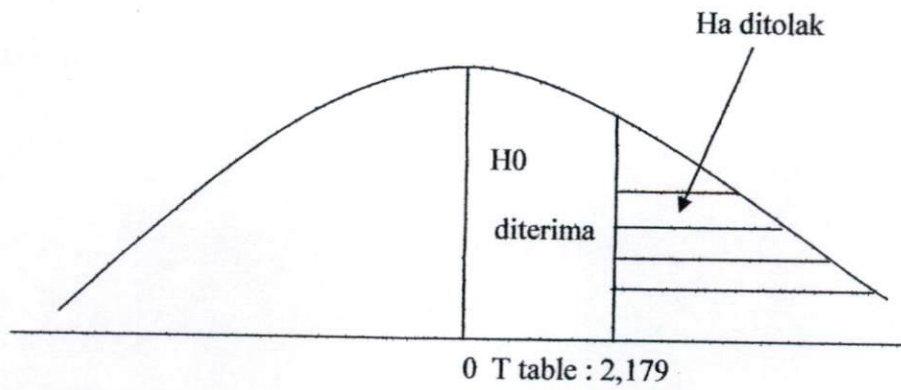
Ha : Tidak terjadi peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets*, dan *Return on Equity*) pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

2. Menentukan hasil t hitung

3. Menghitung t table dengan ketentuan sebagai berikut:

Alfa (α) sebesar 0,05 dan dengan rumus $df = \text{jumlah sampel} - 1$ yaitu 12 maka besarnya t table adalah 2,179

4. Melakukan uji hipotesis secara dua sisi (2-tailed), sebagai berikut:



5. Pengambilan kesimpulan

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Rasio Profitabilitas

Perhitungan rasio profitabilitas yang digunakan sebagai variabel independen penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.1.1 Perhitungan *Net Profit Margin*

PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih tahun 2008 sebesar Rp 353.975.000.000 dan pendapatan bersih tahun 2008 sebesar Rp 413.707.000.000, maka perhitungan *net profit margin*nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Net Profit Margin} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 353.975.000.000}{\text{Rp } 1.591.931.000.000} \times 100\% = 22,24\% \end{aligned}$$

Untuk tahun 2009, PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih sebesar Rp 413.707.000.000 dan pendapatan bersih sebesar Rp 1.932.980.000.000, maka perhitungan *net profit margin*nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Net Profit Margin} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 413.707.000.000}{\text{Rp } 1.932.980.000.000} \times 100\% = 21,40\% \end{aligned}$$

Begitu juga perhitungan untuk 12 perusahaan lainnya. Berikut daftar *net profit margin* untuk semua sample penelitian:

Tabel 4.1 *Net Profit Margin* Perusahaan Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	NPM	
			2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	22.24%	21.40%
2	BCAF	PT BCA Finance	37.60%	48.38%
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	26.04%	33.13%
4	BFNC	PT Bhakti Finance	7.02%	3.49%
5	FIFA	PT Federal Internasional Finance	13.71%	18.88%
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	10.89%	7.55%
7	OTMA	PT Oto Multiartha	25.94%	21.91%
8	PPGD	Perum Pegadaian	21.44%	19.78%
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	76.89%	76.69%
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	2.49%	4.97%
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	4.45%	16.51%
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	21.99%	13.44%
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	1.42%	4.48%

4.1.2 Perhitungan *Return on Asset (ROA)*

PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih tahun 2008 sebesar Rp 353.975.000.000 dan total aset tahun 2008 sebesar Rp 8.438.606.000.000, maka perhitungan *Return on Asset*nya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Return on Asset} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp } 353.975.000.000}{\text{Rp } 8.438.606.000.000} \times 100\% = 4,19\%
 \end{aligned}$$

Untuk tahun 2009, PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih sebesar Rp 413.707.000.000 dan total aset sebesar Rp 9.894.309.000.000, maka perhitungan *Return on Asset*nya adalah:

$$\begin{aligned} \text{Return on Asset} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp 413.707.000.000}}{\text{Rp 9.894.309.000.000}} \times 100\% = 4,18\% \end{aligned}$$

Begitu juga perhitungan untuk 12 perusahaan lainnya. Berikut daftar *Return on Asset* untuk semua sample penelitian:

Tabel 4.2 *Return on Asset* Perusahaan Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	ROA	
			2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	4,19%	4,18%
2	BCAF	PT BCA Finance	12,89%	19,26%
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	6,56%	12,59%
4	BFNC	PT Bhakti Finance	2,37%	1,31%
5	FIFA	PT Federal International Finance	6,68%	8,89%
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	2,94%	2,40%
7	OTMA	PT Oto Multiartha	4,11%	4,72%
8	PPGD	Perum Pegadaian	5,83%	5,03%
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	6,09%	4,85%
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	0,62%	1,25%
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	1,18%	4,93%
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	4,98%	3,35%
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	0,60%	2,36%

4.1.3 Perhitungan *Return on Equity (ROE)*

PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih tahun 2008 sebesar Rp 353.975.000.000 dan total ekuitas tahun 2008 sebesar Rp 1.582.719.000.000, maka perhitungan *net profit margimya* adalah:

$$\begin{aligned}\text{Return on Equity (ROE)} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 353.975.000.000}{\text{Rp } 1.582.719.000.000} \times 100\% = 22,36\%\end{aligned}$$

Untuk tahun 2009, PT. Astra Sedaya Finance memiliki laba bersih sebesar Rp 413.707.000.000 dan total aset sebesar Rp 1.754.302.000.000, maka perhitungan *Return on Equitynya* adalah:

$$\begin{aligned}\text{Return on Equity (ROE)} &= \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\% \\ &= \frac{\text{Rp } 413.707.000.000}{\text{Rp } 1.754.302.000.000} \times 100\% = 23,58\%\end{aligned}$$

Begitu juga perhitungan untuk 12 perusahaan lainnya. Berikut daftar *Return on Equity* untuk semua sample penelitian:

Tabel 4.3 *Return on Equity* Perusahaan Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	ROA	
			2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	22,36%	23,58%
2	BCAF	PT BCA Finance	36,44%	47,25%
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	17,07%	19,64%
4	BFNC	PT Bhakti Finance	11,01%	4,49%
5	FIFA	PT Federal International Finance	26,03%	27,94%
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	18,08%	10,46%
7	OTMA	PT Oto Multiartha	20,23%	20,36%
8	PPGD	Perum Pegadaian	32,32%	31,43%
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	6,14%	6,91%
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	6,99%	8,87%
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	4,05%	17,38%
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	31,62%	18,37%
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	7,51%	18,04%

4.2 Pengujian Hipotesis

Dengan menggunakan uji T, diperoleh hasil perbandingan *Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity* sebelum diberlakukannya perubahan Undang-Undang menjadi Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (tahun 2008) dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (tahun 2009) seperti tampak pada table-tabel berikut ini:

Table 4.4 Rata-Rata Variable Independen (Statistik Sampel Berpasangan)

(Lampiran 4, 5, 6)

Variabel	Rata-rata variabel
NPM 2008	20,85%
NPM 2009	22,31%
ROA 2008	4,62%
ROA 2009	5,69%
ROE 2008	18,38%
ROE 2009	19,46%

Tabel 4.5 Test Sampel Berpasangan (Lampiran 4, 5, 6)

	T hitung	Mean
NPM 2008 – NPM 2009	-0,854	-0,01462
ROA 2008 – ROA 2009	-1.443	-0,01077
ROE 2008 – ROE 2009	-0,506	-0,01077

4.2.1 Pengujian Hipotesis 1

H1: Terjadi peningkatan rasio *Net Profit Margin* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

T hitung untuk NPM 2008 – NPM 2009 adalah -0,854 dan jatuh pada area diterima, yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Terjadi peningkatan rasio *Net Profit Margin* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI

sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Angka perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar -0,01462 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata NPM tahun 2008 sebesar 0,2085 dan NPM tahun 2009 sebesar 0,2231 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata NPM karena diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

4.2.2 Pengujian Hipotesis 2

H2: Terjadi peningkatan rasio *Return on Assets* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

T hitung untuk ROA 2008 – ROA 2009 adalah -1.443 dan jatuh pada area diterima, yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Terjadi peningkatan rasio *Return on Assets* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Angka perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar -0,01077 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata NPM tahun 2008 sebesar 0, 0462 dan NPM tahun 2009 sebesar 0, 0569 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata ROA karena diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

4.2.3 Pengujian Hipotesis 3

H3: Terjadi peningkatan rasio *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

T hitung untuk NPM 2008 – NPM 2009 adalah -0,506 dan jatuh pada area diterima, yang artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya Terjadi peningkatan rasio *Return on Equity* pada perusahaan *Finance Institution* yang terdaftar di BEI sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Angka perbedaan rata-rata (mean difference) sebesar -0,01077 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata NPM tahun 2008 sebesar 0,1838 dan NPM tahun 2009 sebesar 0,1946 yang menunjukkan adanya peningkatan rata-rata NPM karena diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan rasio profitabilitas (*Net Profit Margin*, *Return on Assets Ratio*, dan *Return on Equity*) setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Hal ini berarti terjadi suatu implikasi positif bagi perusahaan yang terkait dengan laba bersih pada perusahaan *Finance Institution* pada tahun sesudah diberlakukannya Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang dikarenakan pengurangan lapisan tarif pajak yang hanya menjadi satu lapis tarif saja. Sehingga dalam tarif yang baru ini, wajib pajak badan dapat lebih diuntungkan sehingga penerimaan dari wajib pajak badan lebih meningkat.

Meningkatnya rasio profitabilitas perusahaan membawa dampak bagus perusahaan. Untuk *net profit margin* yang semakin meningkat menyebabkan semakin baiknya operasi suatu perusahaan. Untuk perhitungan ROA yang meningkat berarti meningkat pula kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan laba. Dan peningkatan ROE dalam suatu perusahaan menyebabkan meningkatnya *return* atau penghasilan yang diperoleh sehingga semakin baik kedudukan pemilikan perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini penulis sadari memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Penelitian ini tidak menggunakan rasio keuangan perusahaan secara keseluruhan.
2. Penelitian ini tidak mewakili industri secara keseluruhan.
3. Penelitian ini menggunakan rentang waktu yang sangat pendek, mengingat perubahan Undang-Undang baru berjalan.

5.3. Saran

Dengan keterbatasan tersebut di atas, penulis mempunyai beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Gunakan rasio keuangan secara menyeluruh sehingga dapat mencerminkan kinerja perusahaan secara mendalam.
2. Gunakan sampel dengan populasi industri yang lebih banyak, sehingga hasil yang diperoleh dapat digunakan secara generalisasi.
3. Gunakan rentang waktu yang lebih panjang, sehingga dapat mencerminkan pertumbuhan kinerja rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Brigham, Eugene F. & Joel F. Houston. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Salemba Empat
- Keown, Arthur J., J. William Petty, et al. 2004. *Financial Management : Principles and Application, Ninth Edition*. Jakarta: Gramedia.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan: 2008.
- Sarwono, Jonathan. 2009. *Statistik Itu Mudah: Panduan Lengkap Untuk Belajar Komputasi Statistik Menggunakan SPSS 16*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Syamsudin, Lukman. 2000. *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weston, J Fred & Thomas E. Copeland. 1999. *Manajemen Keuangan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga
- J. Wild, John, dkk. 2005. *Financial Statement Analysis: Analisis Laporan Keuangan Edisi Kedelapan Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat

Media Online:

- <http://jurnalskripsisites.wordpress.com/2007/10/25/analisis-profitabilitas-perusahaan-manufaktur-yang-go-public-di-bursa-efek-jakarta-bej-sebelum-dan-sesudah-diberlakukannya-undang-undang-perpajakan-tahun-2000/>; diakses tanggal 5 Januari 2010
- <http://www.klinik-pajak.com/pokok-pokok-perubahan-undang-undang-pph-baru.html>: 13 Januari 2008
- <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=4488>: 11 Januari 2010
- Mariwan dan Zainal Arifin. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Usaha Pada Periode Sebelum dan Setelah Reformasi Pajak Tahun 2000 (Studi Kasus pada Badan Usaha di Wilayah Kabupaten Sleman, Kulonprogo dan Gunungkidul), tersedia di <http://journal.uii.ac.id/index.php/Sinergi/article/view/939/870>, diakses tanggal 29 Juli 2010

Lampiran 1: Daftar Laba Bersih Dan Pendapatan Perusahaan *Finance Institution* yang menjadi Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	LABA BERSIH (dalam Rp)		PENDAPATAN (dalam Rp)	
			2008	2009	2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	353.975.000.000	413.707.000.000	1.591.931.000.000	1.932.980.000.000
2	BCAF	PT BCA Finance	192.944.213.160	387.802.092.778	513.099.273.952	801.611.538.876
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	231.761.000.000	301.368.000.000	889.940.000.000	909.590.000.000
4	BFNC	PT Bhakti Finance	11.012.808.592	4.702.258.110	156.942.348.561	134.913.501.382
5	FIFA	PT Federal International Finance	612.383.250.000	811.839.501.000	4.468.089.987.000	4.300.785.097.000
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	66.822.156.467	41.000.528.103	613.678.722.251	542.901.884.740
7	OTMA	PT Oto Multiartha	405.088.000.000	464.396.000.000	1.561.626.000.000	2.119.321.000.000
8	PPGD	Perum Pegadaian	628.373.778.120	798.195.518.921	2.930.594.295.381	4.036.386.891.017
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	77.260.430.360	93.448.733.535	100.485.005.274	121.858.536.613
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	3.447.102.495	15.505.567.011	138.414.888.134	312.137.748.804
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	81.080.000.000	405.101.000.000	1.824.009.000.000	2.453.157.000.000
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	116.914.000.000	60.016.000.000	531.631.000.000	446.574.000.000
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	20.711.363.526	60.671.047.236	1.462.352.146.332	1.355.526.826.287

Lampiran 2: Daftar Total Aset Dan Total Ekuitas Perusahaan *Finance Institution* yang menjadi Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL ASET (dalam Rp)		TOTAL EKUITAS (dalam Rp)	
			2008	2009	2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	8.438.606.000.000	9.894.309.000.000	1.582.719.000.000	1.754.302.000.000
2	BCAF	PT BCA Finance	1.496.885.852.652	2.013.506.967.213	529.483.675.538	820.813.661.736
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	3.530.672.000.000	2.392.980.000.000	1.357.497.000.000	1.534.170.000.000
4	BFNC	PT Bhakti Finance	464.915.462.044	360.228.361.926	99.983.757.034	104.686.015.144
5	FIFA	PT Federal International Finance	9.167.492.267.000	9.128.353.968.000	2.352.908.026.000	2.905.164.227.000
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	2.273.747.795.364	1.708.993.484.642	369.563.759.212	391.857.146.827
7	OTMA	PT Oto Multiartha	9.866.862.000.000	9.832.339.000.000	1.994.014.000.000	2.281.116.000.000
8	PPGD	Perum Pegadaian	10.772.086.469.097	15.859.464.128.255	1.943.999.668.212	2.539.458.187.133
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	1.268.211.836.957	1.927.471.196.729	1.258.133.508.402	1.351.582.241.937
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	552.308.616.736	1.243.386.779.923	49.346.483.830	174.852.050.841
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	6.871.001.000.000	8.212.604.000.000	2.001.878.000.000	2.331.449.000.000
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	2.347.436.000.000	1.792.489.000.000	369.705.000.000	326.750.000.000
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	3.432.967.879.620	2.572.820.777.737	275.716.431.764	336.387.479.000

Lampiran 3: Daftar NPM, ROA, dan ROE Perusahaan *Finance Institution* yang menjadi Sampel

NO	KODE	NAMA PERUSAHAAN	NPM		ROA		ROE	
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	ASDF	PT Astra Sedaya Finance	22.24%	21.40%	4,19%	4,18%	22,36%	23,58%
2	BCAF	PT BCA Finance	37.60%	48.38%	12,89%	19,26%	36,44%	47,25%
3	BFIN	PT BFI Finance Indonesia Tbk	26.04%	33.13%	6,56%	12,59%	17,07%	19,64%
4	BFNC	PT Bhakti Finance	7.02%	3.49%	2,37%	1.31%	11.01%	4,49%
5	FIFA	PT Federal International Finance	13.71%	18.88%	6,68%	8,89%	26,03%	27,94%
6	IMFI	PT Indomobil Finance Indonesia	10.89%	7.55%	2,94%	2,40%	18.08%	10,46%
7	OTMA	PT Oto Multiartha	25.94%	21.91%	4,11%	4,72%	20,23%	20,36%
8	PPGD	Perum Pegadaian	21.44%	19.78%	5,83%	5,03%	32.32%	31,43%
9	SMFP	PT Sarana Multigriya Finansial	76.89%	76.69%	6,09%	4,85%	6,14%	6,91%
10	SMSF	PT Sinar Mitra Sepadan Finance	2.49%	4.97%	0,62%	1,25%	6,99%	8,87%
11	SOFN	PT Summit Oto Finance	4.45%	16.51%	1.18%	4,93%	4,05%	17,38%
12	TUFI	PT Mandiri Tunas Finance	21.99%	13.44%	4,98%	3,35%	31,62%	18,37%
13	WOMF	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	1.42%	4.48%	0,60%	2,36%	7,51%	18,04%

Lampiran 4: Uji T Sampel Berpasangan Untuk *Net Profit Margin*

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	NPM 2008	.2085	13	.20149	.05588
	NPM 2009	.2231	13	.20637	.05724

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 NPM 2008 & NPM 2009	13	.954	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 NPM 2008 - NPM 2009	-.01462	.06173	.01712	-.05192	.02269	-.854	12	.410

Lampiran 5: Uji T Sampel Berpasangan Untuk *Return On Assets*

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ROA 2008	.0462	13	.03355	.00931
	ROA 2009	.0569	13	.05202	.01443

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	ROA 2008 & ROA 2009	13	.890	.000

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ROA 2008 - ROA 2009	-.01077	.02691	.00746	-.02703	.00549	-1.443	12	.175

Lampiran 6: Uji T Sampel Berpasangan Untuk *Return On Equity*

PAIRED SAMPLES STATISTICS

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	ROE 2008	.1838	13	.10836	.03005
	ROE 2009	.1946	13	.11508	.03192

Paired Samples Correlations

	N	Correlation	Sig.
Pair 1 ROE 2008 & ROE 2009	13	.766	.002

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 ROE 2008 - ROE 2009	-.01077	.07675	.02129	-.05715	.03561	-.506	12	.622